

**TRANSFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS E-GOVERNMENT
(Studi Kasus : Kendala Pemerintah Kota Padang Dalam Penerapan e- Government)**

***TRANSFORMATION OF GOVERNMENT MANAGEMENT BASED ON E-GOVERNMENT
(Case Study: Padang City Government Constraints in the Implementation of e-Government)***

Jenasti Viona¹, Khairiyah²
jenastiviona@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini menyajikan analisis tentang mengapa pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia belum sepenuhnya bisa mentransformasikan penyelenggaraan pemerintahannya berbasis e-Government. Ada berbagai Faktor-faktor yang menyebabkan terhalangnya dalam pengembangan e-government di Indonesia termasuk infrastruktur TIK yang buruk, sumber daya manusia yang tidak memadai, kurangnya kesiapan di antara warga negara untuk menggunakan layanan e-government, dan lingkungan yang tidak mendukung. Oleh karena itu tantangan yang harus di hadapi oleh pemerintahan Indonesia adalah mengembangkan program komprehensif dan penilaian kemajuan yang mencakup teknologi, organisasi, warga negara dan dimensi lingkungan untuk mendukung pengembangan e- government.

Kata kunci : *Pemerintah Kota Padang, E-Government & Faktor-Faktor penghambat*

Abstract: The Economic-Political Policy Program in the management of village funds is assistance provided by the central government to each village in order to create an independent and prosperous village. Public. This research is based on the Law that regulates the village, it can be seen from Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The preamble to the Act mandates that in the district government a village can be formed as contained in Article 371 paragraph (1), where the Village has the authority in accordance with the provisions of the legislation regarding villages. shows how the village elites have not been able to understand the rules in managing the village funds. This shows how the government has not succeeded in regulating Village Fund regulations so that it is easily understood by village elites.

Keywords: *Village Fund, Neo-Institutionalism Perspective,*

A. PENDAHULUAN

Penerapan elektronik Government atau yang dikenal dengan istilah e-Government di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil. Meskipun Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden yang mengatur tentang penerapan elektronik government melalui Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 namun Pengembangan e-Government masih pada tahap awal, yakni persiapan. Dijelaskan bahwa terdapat 4 tingkatan dalam implementasi e-government yang masing- masing tingkatannya dapat dicapai secara bertahap, tingkatan tersebut :

1. Persiapan, meliputi : pembuatan situs informasi di setiap lembaga, penyiapan SDM, penyiapan sarana akses yang mudah, sosialisasi situs informasi internal dan publik.
2. Pematangan, meliputi : pembuatan situs informasi publik interaktif, dan pembuatan antarmuka keterhubungan dengan lembaga lain.
3. Pemantapan, meliputi : pembuatan situs transaksi pelayanan publik, dan pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain
4. Pemanfaatan, meliputi : pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B, dan G2C yang terintegrasi.

Perkembangan untuk e-Government khususnya di wilayah Kabupaten Dan kota di Indonesia Rata-rata Masih Pada tahap Persiapan ataupun Pematangan. Mengikuti tren global dalam pengembangan e-government di seluruh dunia, Pemerintah Indonesia pada tahun 2001 memperkenalkan inisiatif e-Indonesia untuk memfasilitasi pengembangan e-government. Ini telah berkomitmen untuk menghabiskan dana sebanyak US \$ 6,78 miliar untuk pengembangan e-government dari 2014 hingga 2019. (Republik Indonesia, 2014) Namun berdasarkan laporan survey Persatuan Bangsa Bangsa (2018) e-government development index, disingkat EGDI hingga akhir 2018 perkembangan e-government di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lainnya, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Indonesia berada di peringkat ke-7 diantara negara di kawasan Asia Tenggara masih jauh di bawah negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura (peringkat ke-

7 EDGI), Malaysia (peringkat ke-48 EDGI), Brunei Darussalam (peringkat ke-59 EDGI), Thailand (peringkat ke-73 EDGI), Philippines (peringkat ke-75 EDGI), dan Vietnam (peringkat ke-88 EDGI). EGDI

untuk edisi 2018 diukur berdasarkan tiga sub index yaitu online service index, telecommunicatoin index, dan human capital index. (United Nation, 2018).

Hal ini menjadi suatu yang menantang bagi Indonesia mengingat program insiatif e-Indonesia yang di canangkan dengan penggunaan dana yang besar dalam pengembangan dan implementasi Egovernment. Dikarenakan oleh infrastruktur TIK yang buruk, sumber daya manusia yang tidak memadai, kurangnya kesiapan di antara warga untuk menggunakan e-government, dan lingkungan yang tidak mendukung. Akibatnya, tercermin dalam peringkat e-government dunia bahwa Indonesia berada jauh di bawah rata-rata dunia dan juga wilayah Asia Tenggara. (United Nation, 2018)

Salah satu Kota yang ada di Wilayah Sumatera Barat Indonesia yang masih mengalami berbagai hambatan dalam penerapan e-Government adalah kota Padang. Dimana kota Padang sebagai Barometer dalam pemerintahan Sumatera barat masih belum optimal dalam memberikan informasi secara online kepada masyarakat. Meskipun pelaksanaan e- Government sudah berlangsung sejak tahun 2003 lalu, tapi masih tahap pertama yakni pada tahap persiapan, terlihat dari situs resmi e-Government kota Padang yakni *www.kotapadang.gov* masih sangat minim informasi dan tidak adanya ruang interaksi dalam web resmi kota tersebut. Hal ini menjadi suatu yang menarik bagi penulis karena kota Padang yang merupakan pusat pemrintahan Provinsi Sumatera Barat tapi belum bisa memberikan layanan e-Government yang update kepada masyarakat.

Berdasarkan dari paparam makalah di atas peneliti berasumsi mempertanyakan pelaksanaan e-gov dari sisi penyelenggara (manajemen dan optimalisasinya). Dan Aapa faktor-faktor penghambat dalam mentransformasikan e-Government dalam pemerintahan di Kota Padang Sehingga Adanya akuntabilitas dan transparansi layanan kepada masyarakat. Oleh karenanya maka dalam tulisan ini dirumuskan satu permasalahan yaitu “Kendala Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Dalam mentransformasikan Penyelenggaraan Pemerintahnya Berbasiskan e-Government khususnya di Kota Padang? “

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, dimana peneliti ingin memusatkan penelitian mengenai penyelenggaraan penerapan E-Government di pemerintahan Kota Padang. Dimana kota Padang sebagai Barometer dalam pemerintahan Sumatera barat masih belum optimal dalam memberikan informasi secara online kepada masyarakat. Meskipun pelaksanaan e-Government sudah berlangsung sejak tahun 2003 lalu, tapi pelaksanaannya masih tahap pertama yakni pada tahap persiapan,. Dengan menggali informasi dari sumber-sumber pemerintahan Kota Padang, dengan melakukan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara secara langsung, peneliti ingin mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh pemerintah kota padang dalam memberikan pelayanan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

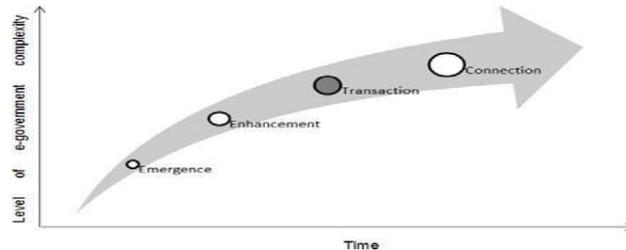
A. LANDASAN TEORI

1. Konsep E-Government

Secara umum, e-government di definisikan sebagai : Pemerintahan elektronik (juga disebut e-gov, digital government, online government atau transformational government) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utamaadalah Government-to-Citizen atau Government- to-Customer(G2C),Government-to-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari e- government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.

E-Government dapat didekati dari berbagai perspektif termasuk e-administrasi, e-masyarakat, dan e-warga negara. (Heeks, R., 2008: 14). Pendekatan e-administrasi adalah tentang peningkatan proses pemerintah dengan mengurangi biaya, meningkatkan kinerja, menghubungkan organisasi publik, dan memberdayakan pegawai pemerintah. Pendekatan e-masyarakat berfokus pada upaya untuk membangun kemitraan antara pemerintah dan masyarakat yang meliputi bisnis, masyarakat sipil dan organisasi nirlaba. Pendekatan e-warga negara berfokus pada interaksi antara organisasi publik dan warga dengan memperoleh masukan dari warga untuk mendorong partisipasi publik, mendukung akuntabilitas, dan meningkatkan layanan publik. (Heeks, R. and Bailur, S., 2007:15). Karena sifat multi-dimensi dari konsep e-government, ini mengarah pada identifikasi tiga klasifikasi utama e-government. Klasifikasi ini didasarkan pada sifat interaksi dalam sistem termasuk pemerintah-ke-bisnis (G2B), pemerintah-ke-pemerintah (G2G), dan pemerintah-ke-warga negara (G2C). (Jeong, C., 2007: 20).

Pengembangan e-government adalah proses transformatif [15; 19]. Tinjauan pengembangan e-government dalam literatur mengarah pada identifikasi empat tahap termasuk (a) kemunculan, (b) peningkatan, (c) transaksi, dan (d) koneksi, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2 berikut ini.



E-government berbasis emergensi adalah tentang memfasilitasi pengiriman informasi dari pemerintah kepada publik. (United Nations, 2016) Ini adalah tahap awal di mana pemerintah menyediakan informasi statis secara online. Tahap ini berfokus pada penyampaian informasi seperti informasi kontak pemerintah dan pengumuman kebijakan. Kualitas informasi adalah perhatian utama dalam tahap ini. Perkembangan teknologi menimbulkan harapan warga untuk e-government untuk memberikan layanan di luar pengiriman informasi. Ini mendesak pemerintah untuk meningkatkan e-government mereka ke tahap berikutnya.

E-government berbasis peningkatan adalah tentang memfasilitasi komunikasi sederhana antara pemerintah dan publik. Ini adalah fase perantara di mana pemerintah memberikan informasi yang dinamis dan transaksi satu arah dasar. Salah satu contoh paling umum adalah umpan balik online, di mana warga negara dapat mengirimkan keluhan mereka tentang layanan pemerintah fisik ke situs web resmi. Selain kualitas informasi, ketepatan waktu informasi menjadi salah satu perhatian utama dalam tahap ini.

E-government berbasis transaksi adalah tentang meningkatkan pengiriman layanan publik melalui penggunaan e-government. Ini adalah tahap perantara di mana transaksi dua arah diaktifkan. Contoh khas adalah portal perpajakan online, di mana warga negara berada dapat mengajukan pajak secara online pada tahap ini, sedangkan sebelumnya ini hanya dapat dilakukan dengan mengunjungi fisik kantor perpajakan. Sebagian besar negara berkembang termasuk Indonesia berada di awal tahap ini. Studi saat ini, oleh karena itu, berfokus pada tahap ini.

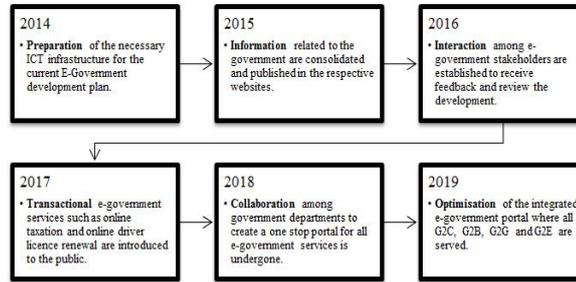
E-Government berbasis koneksi berfokus pada mendefinisikan ulang pengiriman layanan publik dengan menyediakan sistem e-government terpadu satu atap di mana warga negara dapat segera mengakses semua jenis layanan publik. Ini adalah tahap akhir dari pengembangan e-government yang mengasumsikan bahwa koneksi horisontal antara lembaga-lembaga pemerintah serta koneksi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah ada di mana infrastruktur yang dapat diandalkan dengan kapasitas penuh untuk mendukung juga dibentuk.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengembangan E-Government Di Kota Padang

Indonesia adalah salah satu negara berkembang terbesar dengan lebih dari 257 juta penduduk. Penetrasi internet telah mencapai 22% dari total populasi. (World Bank, 2017) Pemerintah Indonesia, oleh karena itu, percaya bahwa e-government adalah platform yang paling cocok untuk melayani sejumlah besar warga secara online. Pada tahun 2001, Pemerintah Indonesia secara resmi memperkenalkan inisiatif e-Indonesia untuk memfasilitasi pengembangan e-government. Dalam program pembangunan saat ini, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menghabiskan US \$ 6,78 miliar untuk pengembangan e-government dari 2014 hingga 2019. Pemerintah Indonesia menetapkan enam tonggak aktif untuk inisiatif e-Indonesia seperti yang diilustrasikan dalam Gambar di bawah ini :

Gambar 2
Peta Jalan E-Government di Indonesia.



Tujuan utama dari rencana enam tahun ini meliputi (a) meningkatkan pengiriman layanan publik, (b) menutup kesenjangan digital, (c) menekan korupsi melalui transparansi e-government, (d) meningkatkan kualitas pendidikan, (e) mendukung pertumbuhan negara, pada akhirnya (f) memperkaya kualitas hidup warga negara Indonesia. Saat ini banyak lembaga pemerintah yang menyatakan dirinya sudah mengaplikasikan e-Government padahal pada kenyataannya lembaga-lembaga pemerintahan tersebut baru dalam tahap web presence, masih belum terlihat adanya penerapan e-government yang benar-benar dijalankan secara mendalam. Oleh karena itu banyak yang menyatakan bahwa pelaksanaan e-gov belum optimal karena secara riil beberapa pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah masih menggunakan cara-cara yang manual seperti proses pembuatan KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, dan lain-lain. Seorang warga harus secara face to face mendatangi petugas yang bersangkutan di kantor pemerintahan, atau bahkan harus mencari seorang “calo”. Hal ini sangatlah tidak efektif dan efisien karena mengeluarkan biaya yang lebih banyak dari biaya sebenarnya dan juga dirasakan menjadi sangat merepotkan karena harus mendatangi kantor pemerintahan tersebut.

Melalui berbagai masukkan data yang ada maka dapat dilihat kondisi dari implementasi penyelenggaraan situs web lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan (e-gov) sebagai berikut :

Tabel 3. Kondisi situs web resmi Pemerintah Daerah Provinsi

	Juml	Situs Web	%	Bisa Dibuka	Tdk Bisa	Belum Punya situs
Pemprov	33	31	94 %	26 (84 %)	5 (16%)	2

Tidak jauh berbeda dengan Kondisi Web Provinsi untuk Web Pemerintahan Kabupaten/Kota sebagai gambar berikut.

Tabel 4. Kondisi situs web resmi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota

	Juml.	Situs Web	%	Bisa Dibuka	Tdk Bisa	Belum Punya situs
Pemkab / Pemkot	465	194	42 %	186 (96 %)	8 (4 %)	271

Dari data di atas maka dapat dilihat ternyata pemerintah daerah provinsi hampir semuanya memiliki situs web dan hampir seluruhnya dapat diakses secara mudah sementara 16 %-nya tidak dapat diakses. Ini menunjukkan bahwa komitmen pihak pemerintah provinsi cukup tinggi dalam implementasi e-gov. Menurut hasil penelitian (sosiawan ; 2015) secara ketentuan teknis masing-masing websites Pemprov yang menjadi telah mengikuti beberapa standar yang diperlukan dalam pembangunan web sebagai media komunikasi dan informasi berdasar ketentuan yang dikeluarkan oleh KOMINFO. Kekurangan yang paling menonjol dari pembangunan websites Pemprov tersebut adalah masih dalam tahapan pematangan atau masih sampai pada fase penyediaan ruang komunikasi interaktif saja, sementara fase ke tahapan lanjut yaitu fase pematapan berupa ketersediaan pelayanan publik serta pemanfaatan berupa layanan lintas instansi masih belum menunjukkan ke arah sana.

Pada pengamatan terakhir pada tahun 2020 ternyata masih menunjukkan hal yang sama dari fenomena di atas, meskipun beberapa situs milik pemprov bergerak ke arah fase ke tiga. Hanya saja pergerakannya nampaknya masih terbata-bata dan belum optimal. Rata-rata ketersediaan links informasi dari situs Pemprov yang diteliti cukup banyak dan lengkap namun justru ini yang menjebak pihak Pemprov untuk tidak mengembangkan beberapa aplikasi layanan e-government yang sesungguhnya yaitu berupa layanan layanan seperti pembuatan KTP, e-employment, layanan hukum, perijinan dan sebagainya.

Secara kuantitatif situs web pemkab dan pemkot ternyata masih sangat sedikit, meskipun secara kualitas baik ; dalam arti sudah sesuai dengan beberapa standar yang diperlukan dalam pembangunan web berdasar panduan yang dikeluarkan oleh KOMINFO. Namun kekurangannya juga sama dengan hampir semua situs web pemprov yaitu masih berada pada tahapan web presence atau tahapan pematangan, meskipun beberapa diantaranya sedang bergerak ke arah fase ke tiga.

Pada jajaran lembaga tinggi dan lembaga non departemen, secara faktual kuantitatif dan kualitas maka nampak sekali perbedaannya dengan situs web pemda. Umumnya hampir setiap lembaga non pemerintahan telah memiliki situs web dan rata-rata optimalisasi fasilitas di dalamnya sudah mampu mendahului jenjang tingkatan situs pemda. Infikator tersebut dapat dilihat dari berbagai fasilitas link dan layanan yang ada pada situs lembaga yang mendekati kesempurnaan fase ke tiga yang terdiri dari aplikasi formulir dan sebagainya. Salah satu contoh situs lembaga yang telah mengoptimalkan situs web nya adalah www.ristek.go.id. Dari web ristek tersebut saat ini sudah mampu membuat aplikasi pendaftaran online dalam rangka hibah maupun tawaran bantuan pembiayaan dalam riset dan lain sebagainya.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa implementasi e-gov di Kabupaten/Kota di Indonesia lebih banyak didominasi oleh situs milik pemprov, pemkab dan pemkot. Namun, situs-situs yang melayani masyarakat dalam urusan umum tersebut masih belum optimal dalam pelaksanaannya baik kuantitas maupun kualitasnya. Artinya ada kendala dan hambatan yang dialami oleh pihak pemda dalam hal mewujudkan implementasi e-gov yang ideal. Oleh karenanya di bawah ini diuraikan faktor- faktor penyebab beserta elemen penjelasnya yang menyebabkan “mandeg” dan kurang optimalnya implemetentasi e-gov di Indonesia.

Dari sisi aturan dan pedoman nampaknya Beberapa pemkab dan pemkot masih “meraba- raba” tentang gambaran yang jelas tentang implementasi e-government akibat belum adanya standardisasi dan sosialisasi yang jelas tentang bagaimana penyelenggaraan situs pemerintah daerah yang riil dan ideal. Artinya walapun undang- undang, peraturan pemerintah dan petunjuk pedoman sudah ada namun masing- masing pemda masih menerjemahkannya secara sendiri-sendiri karena persoalan petunjuk teknis dan operasionalnya yang tidak jelas dan “ngambang”. Maka tidak heran bila masih banyak pegawai pemda yang ditugaskan dalam mengelola e-gov bertanya-tanya seperti apakah e- gov yang ideal itu dari sisi back office maupun front office. Jika pun tidak bertanya umumnya pihak pemda akan mengambil bantuan tenaga dari luar (outsourcecing) yang pada akhirnya terjemahan implementasinya pun belum tentu sesuai. Dalam banyak kasus bentuk keluaran situs web pemda hanya sekedar situs lembaga yang berisi layanan informasi saja tanpa ada manfaat lain dari situs tersebut.

2. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Implementasi E-Government Di Kota Padang

1.Faktor ketersediaan sumber daya manusia (SDM)

Belum tersediannya sumber daya manusia (SDM) yang memadai atau minim dari segi skill dan manajerial dalam pengelolaan situs pemda sehingga masih banyak pemkab dan pemkot yang ragu menerapkan e-gov. Konteks disini memperlihatkan bahwa pelaksanaan e- gov tidak sejalan dengan ketersediaan dan kesiapan dari pihak pemda dalam penyediaan sumber daya yang handal untuk mengelola situs e-gov. Lebih jauh lagi pada akhirnya mereka memaksa sumber daya yang ada untuk melaksanakan kegiatan e- gov dengan keterbatasan pengetahuan dan ketrampilan yang memadai. Apabila SDM diambilkan dari pihak luar maka akan terjadi kurangnya rasa memiliki karena anggapan bahwa implementasi situs web pemda merupakan “proyek” sehingga begitu selesai proyek, maka kegiatan tersebut dianggap telah selesai tanpa muncul kesadaran untuk melakukan pemeliharaan.

Budi Raharjo (Pakar Telematika dari ITB), pernah menjabarkan bahwa teknologi informasi merupakan sebuah bidang baru. Pemerintah umumnya jarang memiliki SDM yang handal di bidang ini. SDM yang handal dan mau mempelajari bidang baru, biasanya berada di lingkungan bisnis dan industri. Sehingga keterbatasan pemerintah dalam bidang ini sering dimanfaatkan oleh oknum bisnis dengan menjual solusi yang salah atau mahal (Raharjo, PAU, ITB, 2004). Permasalahan ketersediaan SDM yang memiliki standar kompetensi dibidang ICT adalah lebih sulit dibandingkan dengan masalah teknologinya. Pada sejumlah kantor pemerintah daerah, PNS yang mempunyai kemampuan di ICT hanya berkisar 3-5 orang saja, beberapa diantaranya belum tentu berlatar belakang pendidikan sarjana bidang Informatika atau Elektro. Hal tersebut terjadi karena kemungkinan pada 10-20 tahun yang lalu pemerintah daerah jarang bahkan tidak pernah merekrut pegawai baru dengan latar belakang bidang ICT karena pada masa itu belum ada gambaran ke depan tentang pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.

2.Manajerial Pengelolaan

Dari sisi manajerial ternyata secara umum SDM yang menangani teknologi informasi dan komunikasi sebagian besar adalah eselon III dan eselon II, sehingga akses ke pimpinan pemerintahan daerah cukup sulit. Artinya secara komunikasi organisasi aliran komunikasi dalam hal pengelolaan e-government masih terbentur jalur birokrasi, kondisi ini akan semakin buruk bila terjadi kurangnya perhatian dan kepedulian

pejabat pemerintah di dalam pembangunan dan pengembangan e-government Kasus lainnya ternyata ditemukan adanya beberapa pemerintah daerah yang mempunyai lebih dari satu situs web yang dibuat dan dikelola oleh 2-3 perangkat daerah yang berbeda (contoh www.sulteng.go.id dibuat dan dikelola oleh Bappeda Sulteng, www.infokom-sulteng.go.id dibuat dan dikelola oleh DisInfokom Sulteng, selain itu untuk provinsi Jawa Barat memiliki 2 alamat situs yaitu jabar.go.id dan jabarprov.go.id). Hal ini terjadi karena pengelola situs web pemerintah daerah masih ditangani oleh berbagai unit kerja yang terdapat di pemerintahan daerah, antara lain Dinas Informasi dan Komunikasi (DisInfokom), Kantor Pengelolaan Data Elektronik (KPDE), Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), Bagian Humas, Badan Informasi Komunikasi dan Pengelola Data Elektronik (BIK & PDE). Kondisi tersebut terjadi disebabkan adanya PP No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, sehingga setiap pemerintah daerah tidak sama di dalam penugasan perangkat daerah yang menangani pengelolaan situs web di daerahnya masing-masing

3. Infrastruktur yang Tidak memadai

Faktor ke tiga yang menjadi penghambat dalam implementasi e-government di Indonesia adalah penetrasi pasar hardware dan provider layanan jasa teknologi komunikasi dan informasi belum merata hingga daerah-daerah, sehingga bukan hanya masalah dalam suprastrukturnya saja tetapi dalam infrastrukturnya juga masih kurang memadai. Masalah tersebut juga diperparah dengan masih mahal sarana dan prasarana teknologi ICT.

4. Pendanaan Yang Mahal

Di beberapa daerah terpencil di Indonesia masih belum tersedia saluran telekomunikasi atau bahkan aliran listrik. Jika fasilitasnya sudah ada, harga yang ditawarkan masih relatif mahal. Bila melihat kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan serta kondisi alam yang berstruktur banyak bukit serta pegunungan maka hal ini juga merupakan kendala yang perlu dipertimbangkan sehingga masalah penyiapan pendanaan (budget) untuk keperluan ini dapat dipastikan akan memakan biaya yang banyak.

Secara faktual sebagian besar kantor pemerintah daerah sudah memiliki koneksi LAN dan sebagian kecil yang telah memiliki koneksi WAN. Meskipun sudah memiliki koneksi LAN di kantor pemerintah daerah, tetapi pertukaran data melalui komunikasi data belumlah banyak dilakukan, mengingat ketiadaan data dan informasi yang diharapkan karena masih rendahnya konsepsi basis datanya. Hal ini disebabkan karena kultur mendokumentasikan belum lazim. Bahkan arsip atau dokumen pribadi belum terkelola dengan baik, sehingga ini juga menjadi hambatan dalam integrasi dan pertukaran data. Pada sisi lain dalam hal koneksi ke internet Instansi pemerintah di daerah secara sekilas kadang tidak mempunyai pilihan yang terlalu banyak untuk dapat melakukan koneksi ke Internet, mengingat di beberapa daerah hanya tersedia sedikit provider internet sehingga sering ditemui pemda yang hanya bergantung pada satu provider saja tanpa ada pilihan lain.

PENUTUP

Paparan di atas memberikan beberapa simpulan yang penting diperhatikan dalam implementasi e-gov di Indonesia yaitu ; bahwa implementasi e-gov di Indonesia masih separoh jalan dan masih jauh di bawah standar yang ideal dan yang diinginkan. Kekurangan idealnya bukan saja dalam konteks lokal namun juga dalam konteks global. Capaian secara kuantitatif menunjukkan progress yang cukup berarti namun dari sisi kualitas belum memadai karena kekurangan di dalam SDM, infrastruktur serta regulasinya. Oleh karena itu maka harus dilakukan penyempurnaan konsep dan strategi pelaksanaan e-gov dari berbagai sisi. Adanya regulasi dan standard pembangunan e-gov perlu dibuat agar tidak terjadi pendefinisian dan pemaknaan e-gov secara sendiri-sendiri oleh pihak penyelenggara yaitu pemerintah daerah.

Secara manajerial, e-gov yang dilaksanakan oleh pemda meski mengikuti parameter panduan dari depkominfo namun secara nyata masih berorientasi pada web presence saja 2 tahapan lainnya yaitu transaksi, dan transformasi masih diabaikan untuk dijalankan . Oleh karenanya perlu dilakukan sosialisasi ulang secara komprehensif melalui diklat, kursus dan workshop kepada para penyelenggara situs web daerah. Sosialisasi ulang penyelenggaraan e-gov tidak saja membenahi masalah back office nya atau segi manajerialnya tetapi juga membenahi front office nya yaitu content yang disediakan bagi publik untuk diakses dan digunakan.

Secara teknis, pihak pemerintah daerah khususnya Kota Padang sebagai penyelenggara e-gov tidak memiliki blue print atau masterplan penyelenggaraan dan pengembangan e-gov. Kalaupun ada, nampaknya masih menggunakan pendekatan teknis telematika saja dan mengabaikan aspek lain seperti ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini juga menjadi alasan tuduhan mengapa e-gov di Indonesia tidak berjalan dengan baik. Oleh karenanya diperlukan satu blue print atau master plan e-gov di Indonesia yang sejalan dengan arah pembangunan nasional baik untuk jangka panjang dan jangka pendek yang menghampiri aspek pemerintahan, politik, budaya, manajemen, ekonomi, antropologi, filsafat, agama, pertanian, industri, perdagangan, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya hakekat menyelenggarakan e-gov adalah identik dengan menyelenggarakan kebijakan pemerintahan untuk kemaslahatan masyarakat dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah :

Edwi Arief Sosiawan Seminar Nasional Informatika 2008 (semnasIF 2008)

UPN "Veteran" Yogyakarta, 24 Mei 2008

Heeks, R., 2008. Benchmarking e- Government: Improving the national and international measurement, evaluation and comparison of e-Government.

Heeks, R. and Bailur, S., 2007. Analyzing e-government research: Perspectives, philosophies, theories, methods, practice. *Government information quarterly* 24, 2,243-265. DOI=
<http://dx.doi.org/10.1016/j.giq.2006.06.005>.

Republik Indonesia, 2014. Rencana Pitalebar Indonesia 2014- 2019, K.P.P. NASIONAL Ed. Republik Indonesia, Jakarta.

United Nations, 2016. United Nations E- Government Survey 2016. Department of Economic and Social Affairs.

United Nations, 2018. United Nations E- Government Survey Department of Economic and Social Affairs.

World Bank, 2017. Indonesia Economic Quarterly. World Bank

Pustaka yang berupa buku :

Meolong, J Lexy. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Peter.Finkenbusch, (2017) *Rethinking Neo-Instituional Statebuilding: The Knowledge*